

# **EFEKTIVITAS PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**

Edy Santoso.S

Mahasiswa Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen

YAPIM Maros

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah Yang Dilakukan Oleh Inspektorat Kota Makassar. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif, digunakan untuk menjelaskan pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar dan metode Analisis Efektivitas, digunakan untuk mengetahui efektivitas pengawasan keuangan daerah oleh Inspektorat Kota Makassar, yaitu dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi pengawasan dengan rencana pengawasan yang ditetapkan dengan dikali 100%, guna mengetahui tingkat efektivitas (hasil) yang dicapai untuk mencapai tujuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Makassar telah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau sudah efektif.

Kata kunci: **Efektivitas Pengawasan Keuangan Daerah**

## **LATAR BELAKANG**

Penerapan Otonomi daerah sebagai upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah secara proporsional diwujudkan dengan peraturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah. Lebih khusus bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antara daerah secara proporsional, demokratis, adil

dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut.

Hakikat otonomi daerah yaitu berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, Sehingga konsekuensi dari pelaksanaan OTODA dan tuntutan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) adalah bahwa pemerintah daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. upaya mewujudkan cita-cita pembangunan daerah, bangsa dan negara sebagaimana tersirat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam konteks pembangunan daerah, kebijakan keuangan daerah senantiasa diarahkan pada tercapainya sasaran pembangunan, terciptanya perekonomian daerah yang mandiri sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan berdasarkan demokrasi ekonomi yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan meningkatkan kemakmuran rakyat yang merata, namun dalam proses pelaksanaan otonomi daerah baik, aturan, kewenangan, serta mekanisme kerja yang telah ditetapkan tidaklah menjamin untuk dijalankan dengan baik, lagi-lagi realitas pembangunan menyatakan kita akan krisis moral oleh pelaksana pembangunan yang berujung pada kecenderungan adanya penyimpangan seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Thank you for using [www.freepdfconvert.com](http://www.freepdfconvert.com)

Only two pages are converted. Please Sign Up to convert more pages.

<https://www.freepdfconvert.com/>